

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN BERBASIS CCTV UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN PARTISIPASI WARGA DI RT 03/RW 09 PERUMAHAN PLAMONGAN HIJAU, KOTA SEMARANG

Aji Primanto¹, Linda Puspitasari²

¹Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Sumatera Utara; ajiprimanto78@gmail.com

²Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Sumatera

Utara; puspitasarilinda739@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025-08-28

Revised 2025-09-16

Accepted 2025-09-30

ABSTRAK

Keamanan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan keterlibatan aktif warga dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang aman dan kondusif. Sebelum pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat, sistem keamanan di RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau, Kota Semarang masih mengandalkan ronda malam dan pemantauan manual sehingga efektivitas pengawasan lingkungan belum optimal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan lingkungan dan partisipasi masyarakat melalui implementasi sistem keamanan berbasis Closed Circuit Television (CCTV) dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan program, implementasi CCTV, pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem CCTV berhasil diimplementasikan pada lokasi yang telah ditetapkan, masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengoperasian serta pengelolaan sistem keamanan, dan terbentuk komitmen bersama antara pengurus RT dan warga untuk menjaga keberlanjutan program. Implementasi CCTV tidak hanya meningkatkan efektivitas pemantauan lingkungan dan ketersediaan dokumentasi visual, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola keamanan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan sistem keamanan lingkungan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan serta berpotensi direplikasi pada kawasan permukiman dengan karakteristik serupa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; CCTV; Keamanan Lingkungan; Partisipasi Masyarakat; Pengabdian Kepada Masyarakat

ABSTRACT

Environmental security is one of the basic needs of the community that requires active citizen involvement in creating a safe and conducive residential environment. Prior to the implementation of the Community Service program, the security system in RT 03/RW 09 of Plamongan Hijau Housing, Semarang City still relied on night patrols and manual monitoring so that the effectiveness of environmental supervision was not optimal. This activity aims to improve environmental security and community participation through the implementation of a Closed Circuit Television (CCTV)-based security system with a community empowerment approach. The implementation method uses a participatory approach implemented through five stages, namely needs identification, program planning, CCTV implementation, community empowerment through socialization and training, and monitoring and evaluation. The results of the activity showed that the CCTV system was successfully implemented at the designated location, the community gained increased knowledge and skills in operating and managing the security system, and a joint commitment was formed between RT administrators and residents to maintain the sustainability of the program. The implementation of CCTV not only increased the effectiveness of environmental monitoring and the availability of visual documentation, but also strengthened community participation in environmental security governance. These findings show that the integration between the use of technology and community empowerment can produce a more effective, participatory and sustainable environmental security system and has the potential to be replicated in residential areas with similar characteristics.

Keyword: Community Empowerment; CCTV; Environmental Security; Community Participation; Community Service

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Aji Primanto

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

1. PENDAHULUAN

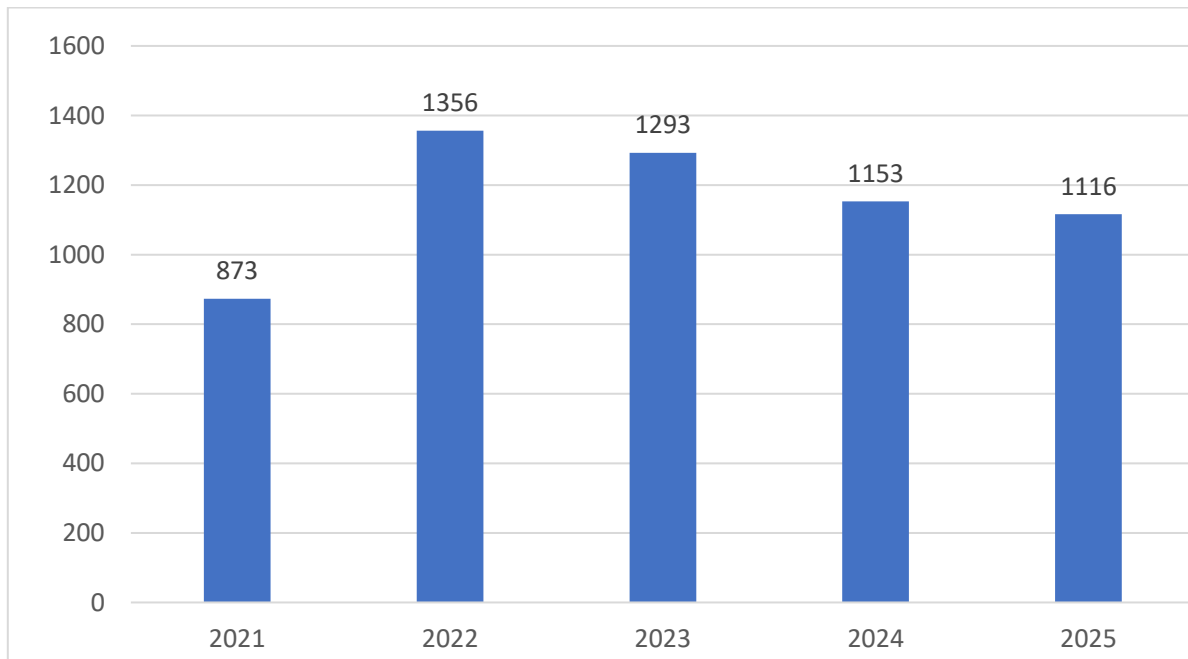
Administrasi publik pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Perkembangan paradigma administrasi publik menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan berbagai program public (Héritier & Eckert, 2008). Perspektif tersebut menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program secara berkelanjutan (Zaenuri, 2021). Salah satu bentuk

pelayanan publik yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat adalah penyelenggaraan keamanan lingkungan di kawasan permukiman (Febrian, Rahman, Yuza, & Zainal, 2023).

Penyelenggaraan keamanan lingkungan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan aparat keamanan, tetapi memerlukan pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengidentifikasi permasalahan, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan bersama (Zimmerman, 2000). Dalam perspektif administrasi publik, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan di tingkat komunitas (Zarychta, Grillos, & Andersson, 2020).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat juga memerlukan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, pengurus lingkungan, dan masyarakat. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan publik. Dalam konteks keamanan lingkungan, kolaborasi tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pengurus RT, warga, serta pemanfaatan teknologi sebagai instrumen pendukung pengawasan lingkungan sehingga tercipta sistem keamanan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan (Kirk, 2023).

Permasalahan keamanan masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Semarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, jumlah tindak kejahatan selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi, yaitu sebanyak 873 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 1.356 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1.293 kasus pada tahun 2023, 1.153 kasus pada tahun 2024, dan 1.116 kasus pada tahun 2025 (Alim, Taufik, & Nurdin, 2022). Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun setelah tahun 2022, jumlah tindak kejahatan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa penguatan sistem keamanan lingkungan tetap menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya preventif berbasis partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat komunitas (Irianto, Ananda Kurniawan, & Mulyono, 2022).



Gambar 1. Tren Jumlah Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2021–2025

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui pemanfaatan Closed Circuit Television (CCTV). Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, CCTV diposisikan bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai instrumen yang mendukung efektivitas pengawasan lingkungan, mempercepat identifikasi kejadian, menyediakan bukti visual, serta meningkatkan respons masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan. Piza, Welsh, Reid, dan Hatten (2025) menunjukkan bahwa implementasi CCTV dalam strategi *place-based crime prevention* mampu memberikan dampak pencegahan kejahatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang apabila diterapkan secara tepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana pendukung yang efektif apabila diintegrasikan dengan partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang baik (Widanti, 2022).

RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau, Kota Semarang, merupakan salah satu kawasan permukiman yang memiliki aktivitas sosial masyarakat cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pengurus RT, sistem keamanan lingkungan sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat masih mengandalkan ronda malam, pemantauan langsung oleh warga, serta penyampaian informasi melalui media komunikasi apabila terjadi keadaan darurat (Purdy, 2012). Kawasan tersebut belum memiliki sistem keamanan berbasis CCTV sehingga pemantauan lingkungan belum dapat dilakukan secara berkesinambungan dan dokumentasi visual terhadap suatu kejadian belum tersedia sebagai pendukung proses identifikasi maupun evaluasi keamanan lingkungan (Ansell & Gash, 2018).

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi mitra tidak hanya berupa belum tersedianya perangkat CCTV, tetapi juga masih terbatasnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sistem keamanan lingkungan secara terpadu. Sistem keamanan masih dilakukan secara manual, belum tersedia mekanisme pemantauan selama dua puluh empat jam, belum terdapat dokumentasi visual terhadap berbagai kejadian di lingkungan, serta belum terdapat pengetahuan mengenai pengoperasian dan pemeliharaan sistem keamanan berbasis CCTV. Ringkasan kondisi awal mitra disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Awal Permasalahan Mitra Sebelum Pelaksanaan PKM

Permasalahan	Kondisi Sebelum PKM
Sistem keamanan	Mengandalkan ronda malam
CCTV	Belum tersedia
Pemantauan lingkungan	Dilakukan secara manual
Bukti visual kejadian	Tidak tersedia
Monitoring 24 jam	Belum dapat dilakukan
Kapasitas masyarakat	Belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan CCTV

Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat melalui Implementasi Sistem Keamanan Lingkungan Berbasis CCTV untuk Meningkatkan Keamanan dan Partisipasi Warga di RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau Kota Semarang (Cifuentes-Faura, 2024). Program ini dirancang melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan pengurus RT dan warga sejak tahap identifikasi kebutuhan, pemasangan perangkat CCTV, pelatihan pengoperasian, hingga penyusunan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan secara partisipatif. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan tersedianya infrastruktur keamanan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keamanan lingkungan secara mandiri, memperkuat kolaborasi antarwarga, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat komunitas (Herdiyanti, Hapsari, & Susanto, 2019).

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Lokasi dan Mitra Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau, Kota Semarang, yang dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bersama pengurus lingkungan (Evjen, Hosseini Raviz, Petersen, & Krogstie, 2020). Kawasan ini merupakan permukiman dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, namun sebelum pelaksanaan program belum memiliki sistem keamanan lingkungan berbasis CCTV (Pantiwati, Permana, Kusniarti, & Miharja, 2020). Sistem keamanan masih mengandalkan ronda malam, pengawasan langsung oleh warga, serta penyampaian informasi melalui media komunikasi apabila terjadi keadaan darurat. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penguatan kapasitas masyarakat melalui implementasi sistem keamanan lingkungan berbasis CCTV sebagai upaya meningkatkan keamanan dan partisipasi warga (Steiss, 2019).

Mitra dalam kegiatan ini adalah pengurus RT 03/RW 09 beserta masyarakat setempat yang berperan aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penentuan lokasi pemasangan CCTV, pelaksanaan pelatihan, hingga penyusunan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sistem keamanan secara berkelanjutan (Clauss, Abebe, Tangpong, & Hock, 2021). Keterlibatan masyarakat sejak awal merupakan bagian dari pendekatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga keberlanjutan kegiatan dapat terjaga (Bryson, Edwards, & Van Slyke, 2018).

2.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment approach*) dengan prinsip partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan (Verma, Kumar, Mittal, Gupta, & Hsu, 2022). Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan perspektif administrasi publik yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pengurus lingkungan, serta warga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat komunitas (Sitti Mukarramah, Indriani, & Zulaeha A. Amdadi, 2021). Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan program, implementasi sistem keamanan berbasis CCTV, peningkatan kapasitas masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.



2.3 Indikator Keberhasilan Program

Keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya diukur dari terselesainya pemasangan perangkat CCTV, tetapi juga dari perubahan kapasitas masyarakat dalam mengelola sistem keamanan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan (Charisma, Hermanto, Purnomo, & Herawati, 2025). Penilaian keberhasilan program disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan kegiatan, mencakup aspek ketersediaan infrastruktur, peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga, partisipasi masyarakat, penguatan tata kelola, serta keberlanjutan pengelolaan sistem keamanan lingkungan. Indikator keberhasilan program disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Program Keamanan Wilayah RT.03/RW.09 Perumahan Plamongan Hijau Kota Semarang

Aspek	Indikator Keberhasilan
Infrastruktur	CCTV terpasang dan berfungsi sesuai rencana
Kapasitas masyarakat	Warga mampu mengoperasikan sistem CCTV
Partisipasi masyarakat	Pengurus RT dan warga terlibat dalam pengelolaan sistem keamanan
Tata kelola	Tersusun mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan CCTV
Keberlanjutan	Terdapat komitmen masyarakat untuk mengoperasikan dan memelihara sistem secara mandiri

Indikator tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menilai ketercapaian program secara menyeluruh (Hasan et al., 2022). Pencapaian program tidak berhenti pada kondisi perangkat CCTV yang telah terpasang dan berfungsi, tetapi juga ditunjukkan oleh kemampuan warga dalam mengoperasikan perangkat, keterlibatan pengurus RT dan masyarakat dalam pengelolaan, tersusunnya mekanisme pemeliharaan, serta adanya komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan sistem keamanan lingkungan. Kerangka penilaian ini menegaskan bahwa implementasi CCTV merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat tata kelola keamanan berbasis partisipasi warga (Purwanti, Winarto, & Suciati, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Kebutuhan Mitra

Identifikasi kebutuhan merupakan tahapan awal yang menentukan arah pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat karena memberikan pemahaman mengenai kondisi eksisting keamanan lingkungan, karakteristik wilayah, serta kebutuhan riil masyarakat terhadap penguatan sistem keamanan berbasis teknologi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi lapangan dan diskusi partisipatif bersama Ketua RT, pengurus lingkungan, serta perwakilan warga RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau, Kota Semarang (Fithriyana, 2020). Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan harapan yang berkaitan dengan sistem keamanan lingkungan sehingga program yang dirancang benar-benar berorientasi pada kebutuhan mitra. Pola pelibatan masyarakat sejak tahap awal sejalan dengan konsep *community empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan program pembangunan di tingkat komunitas (Zimmerman, 2000). Keterlibatan berbagai pihak dalam proses identifikasi juga mencerminkan prinsip *collaborative governance*, yaitu membangun kesepahaman melalui dialog dan pengambilan keputusan bersama sebelum pelaksanaan program dilakukan (Rusydan, 2019).

Observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem keamanan lingkungan sebelum pelaksanaan program masih mengandalkan ronda malam dan pengawasan langsung oleh warga. Mekanisme tersebut telah menjadi bagian dari budaya gotong royong masyarakat, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, jumlah personel, serta kemampuan pemantauan pada setiap sudut lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara berkelanjutan selama dua puluh empat jam. Situasi ini juga mengakibatkan masyarakat belum memiliki dokumentasi visual yang dapat dimanfaatkan sebagai bukti pendukung apabila terjadi gangguan keamanan maupun kejadian lain yang memerlukan proses identifikasi lebih lanjut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan konvensional masih memerlukan dukungan teknologi

untuk meningkatkan efektivitas pemantauan tanpa menghilangkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Diskusi bersama masyarakat memperkuat hasil observasi lapangan dengan menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sistem keamanan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Warga menyampaikan bahwa keberadaan CCTV dipandang mampu mendukung pengawasan lingkungan secara lebih optimal, terutama pada titik-titik yang memiliki mobilitas tinggi dan akses keluar masuk kawasan permukiman. Aspirasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan perangkat, tetapi juga mencakup kebutuhan akan pengetahuan mengenai pengoperasian, pemanfaatan, dan pemeliharaan sistem CCTV. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan warga dalam mengelola teknologi secara mandiri. Pandangan ini sejalan dengan konsep pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan layanan, sehingga inovasi yang diterapkan mampu memberikan nilai publik (*public value*) secara berkelanjutan (Moore, 1995; Osborne, 2010).

Gambar 3.1 memperlihatkan proses diskusi antara tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan Ketua RT, pengurus lingkungan, dan warga dalam mengidentifikasi permasalahan serta menyusun kebutuhan program. Forum diskusi tersebut menjadi media untuk membangun kesepahaman mengenai tujuan kegiatan, menentukan prioritas kebutuhan, serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program (Hatmanto & Rahmawati, 2022).



Gambar 3. Diskusi Tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan Ketua RT dan Warga dalam Rangka Identifikasi Kebutuhan Program

Hasil identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi mitra tidak hanya berkaitan dengan belum tersedianya sistem CCTV, tetapi juga terbatasnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan program yang mengintegrasikan implementasi CCTV dengan kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa teknologi diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola keamanan lingkungan, sedangkan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan

keberhasilan dan keberlanjutan program. Dengan demikian, tahap identifikasi kebutuhan tidak hanya menghasilkan pemetaan permasalahan, tetapi juga membangun fondasi kolaboratif yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.2 Perencanaan Program

Hasil identifikasi kebutuhan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara partisipatif bersama Ketua RT, pengurus lingkungan, dan perwakilan warga RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau. Tahap perencanaan diarahkan untuk menyusun kesepakatan mengenai bentuk kegiatan, sasaran program, pembagian peran, jadwal pelaksanaan, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa keputusan mengenai pelaksanaan program tidak ditentukan secara sepihak oleh tim pelaksana, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pola tersebut sejalan dengan konsep *community empowerment* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program agar mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil kegiatan (Zimmerman, 2000).

Proses perencanaan diawali dengan penyampaian hasil identifikasi kebutuhan kepada seluruh peserta sebagai dasar penyusunan rencana aksi. Forum koordinasi dimanfaatkan untuk mendiskusikan prioritas kegiatan, menentukan lokasi pemasangan CCTV berdasarkan tingkat kerawanan dan mobilitas warga, serta menyepakati tahapan pelaksanaan program. Diskusi juga menghasilkan pembagian tugas antara tim Pengabdian kepada Masyarakat, pengurus RT, dan masyarakat sehingga setiap pihak memahami tanggung jawabnya masing-masing selama pelaksanaan kegiatan. Kesepakatan tersebut mencerminkan proses pengambilan keputusan secara kolaboratif yang didasarkan pada dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama sebagaimana dijelaskan dalam konsep *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008).

Perencanaan program tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemasangan perangkat CCTV, tetapi juga mencakup strategi penguatan kapasitas masyarakat agar sistem keamanan yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan disusun secara terpadu mulai dari implementasi perangkat, sosialisasi, pelatihan pengoperasian, hingga monitoring dan evaluasi. Penyusunan tahapan tersebut menunjukkan bahwa teknologi diposisikan sebagai instrumen pendukung pelayanan kepada masyarakat, sedangkan keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut secara mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif *public service* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam penciptaan nilai publik melalui penyelenggaraan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Endah, 2020).

Gambar 3.2 memperlihatkan proses koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan program antara tim Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua RT, pengurus lingkungan, dan perwakilan warga. Forum koordinasi tersebut menjadi media untuk menyepakati tahapan kegiatan, lokasi implementasi, serta pembagian peran masing-masing pihak sehingga seluruh rangkaian program dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah.



Gambar 4. Koordinasi dan Perencanaan Program bersama Ketua RT dan Perwakilan Warga

Hasil perencanaan menghasilkan kesepakatan mengenai tahapan implementasi program yang meliputi pemasangan sistem keamanan berbasis CCTV, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, serta kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program. Kesepakatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sehingga setiap tahapan dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif tidak hanya menghasilkan dokumen rencana kegiatan, tetapi juga membangun komitmen bersama yang menjadi fondasi keberhasilan implementasi program Pengabdian kepada Masyarakat (Akbar, Adrian, Al-huda, & Tarmizi, 2024).

3.3 Implementasi Sistem Keamanan Berbasis CCTV

Tahap implementasi merupakan inti dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan mewujudkan sistem keamanan lingkungan berbasis Closed Circuit Television (CCTV) sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan perencanaan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan tim Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua RT, pengurus lingkungan, dan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut tidak hanya memperlancar proses pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap sistem keamanan yang dibangun. Implementasi yang melibatkan masyarakat sejak tahap awal merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan suatu program pemberdayaan (Zimmerman, 2000).

Pelaksanaan implementasi diawali dengan pemasangan perangkat CCTV pada titik-titik strategis yang telah ditentukan melalui proses perencanaan partisipatif. Penentuan lokasi pemasangan mempertimbangkan akses keluar masuk kawasan, jalur utama aktivitas warga, serta area yang memiliki intensitas pergerakan masyarakat relatif tinggi. Pertimbangan tersebut bertujuan agar cakupan pemantauan mampu menjangkau area yang memiliki potensi kerawanan lebih besar sehingga fungsi sistem keamanan dapat berjalan secara optimal. Setelah seluruh perangkat terpasang, dilakukan konfigurasi sistem, pengujian fungsi kamera, serta penyesuaian akses pemantauan untuk memastikan seluruh perangkat dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan.



Gambar 5. Implementasi Sistem Keamanan Berbasis CCTV di RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau

Dokumentasi visual yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan keamanan maupun kejadian lain yang memerlukan proses identifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi mampu meningkatkan efektivitas sistem keamanan apabila diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan sosial yang telah berkembang di masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Piza et al. (2025) yang menjelaskan bahwa efektivitas CCTV tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perangkat, tetapi juga oleh integrasinya dengan sistem pengawasan lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatannya (Moorcy, Yusuf, & Pudjiati, 2020).

Implementasi sistem CCTV dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran ronda malam maupun kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan. Sebaliknya, teknologi berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat sistem keamanan berbasis komunitas melalui penyediaan informasi visual yang mendukung proses pemantauan, deteksi dini, dan pengambilan keputusan apabila terjadi gangguan keamanan. Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma pelayanan publik yang menempatkan inovasi teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, bukan sebagai tujuan akhir dari penyelenggaraan layanan publik (Osborne, 2010). Dengan demikian, keberhasilan implementasi program tidak hanya diukur dari berfungsinya perangkat CCTV, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam mendukung partisipasi masyarakat dan memperkuat tata kelola keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

3.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Keamanan Berbasis CCTV

Keberhasilan implementasi sistem keamanan berbasis CCTV tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perangkat yang berfungsi dengan baik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara sistem tersebut secara mandiri. Oleh karena itu,

setelah proses implementasi selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan Ketua RT, pengurus lingkungan, serta perwakilan warga RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau. Tahapan ini bertujuan membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sistem keamanan lingkungan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pendampingan dari tim pelaksana. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *community empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian untuk mengelola kepentingan bersama (Zimmerman, 2000).



Gambar 6. Pemasangan Banner Sebagai Media Sosialisasi Kepada Warga RT.03/RW.09 Perumahan Plamongan Hijau Kota Semarang.

Materi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan meliputi pengenalan fungsi sistem CCTV, tata cara mengakses hasil pemantauan, pemanfaatan rekaman sebagai dokumentasi apabila terjadi gangguan keamanan, serta langkah-langkah dasar pemeliharaan perangkat. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara interaktif melalui penyampaian materi, demonstrasi, dan praktik langsung sehingga peserta tidak hanya memahami konsep penggunaan CCTV, tetapi juga memiliki pengalaman dalam mengoperasikan sistem yang telah dipasang. Model pembelajaran partisipatif tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, serta berbagi pengalaman mengenai pengelolaan keamanan lingkungan yang selama ini telah dilakukan (Hartono, 2023).

Pelaksanaan pelatihan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Peserta aktif mengikuti demonstrasi penggunaan sistem, mencoba mengoperasikan perangkat, serta berdiskusi mengenai mekanisme pemanfaatan CCTV sebagai pendukung keamanan lingkungan. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya

menerima keberadaan teknologi sebagai fasilitas baru, tetapi juga mulai memahami peran mereka dalam menjaga keberlanjutan sistem keamanan yang telah dibangun. Kondisi ini mencerminkan terbentuknya rasa memiliki (*sense of ownership*) yang merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Zimmerman, 2000).

Peningkatan kapasitas masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga memperkuat praktik *collaborative governance* pada tingkat komunitas. Pengurus RT dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pembagian tanggung jawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem CCTV sehingga pengelolaan keamanan lingkungan tidak lagi hanya bergantung pada individu tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Ansell dan Gash (Prasetyo & Utami, 2019) menjelaskan bahwa kolaborasi yang dibangun melalui komunikasi, kepercayaan, dan komitmen bersama akan meningkatkan keberhasilan implementasi suatu program publik. Temuan pada kegiatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi faktor yang memperkuat keberlanjutan implementasi CCTV sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan berbasis partisipasi warga.

3.5 Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan menilai ketercapaian program sekaligus memastikan keberlanjutan pemanfaatan sistem keamanan berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di lingkungan RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau. Kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi terhadap kinerja sistem, pengujian fungsi perangkat, serta diskusi bersama Ketua RT, pengurus lingkungan, dan masyarakat untuk memperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek teknis berfungsinya perangkat CCTV, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, tingkat partisipasi warga, serta komitmen dalam mengelola sistem keamanan lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan evaluasi tersebut sejalan dengan prinsip *community empowerment* yang menempatkan keberhasilan program pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri (Zimmerman, 2000).

Hasil monitoring menunjukkan bahwa seluruh perangkat CCTV yang telah dipasang berfungsi dengan baik dan mampu mendukung pemantauan pada titik-titik strategis di lingkungan permukiman. Sistem yang telah terpasang memberikan kemudahan bagi pengurus RT dalam melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara lebih berkesinambungan dibandingkan dengan mekanisme pengawasan yang sebelumnya hanya mengandalkan ronda malam dan pengawasan langsung oleh warga. Rekaman visual yang dihasilkan juga memberikan nilai tambah sebagai dokumentasi apabila terjadi gangguan keamanan maupun kejadian lain yang memerlukan proses identifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi telah memperkuat sistem keamanan lingkungan tanpa mengurangi peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan kawasan. Temuan ini sejalan dengan Piza et al. (2025) yang menjelaskan bahwa efektivitas sistem CCTV akan meningkat apabila diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat.

Evaluasi bersama mitra menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami fungsi dasar sistem CCTV, mampu melakukan pemantauan, serta mengetahui langkah-langkah dasar dalam pengoperasian dan pemeliharaan perangkat. Pengurus RT bersama masyarakat juga menyepakati mekanisme pengelolaan sistem yang mencakup pembagian tanggung jawab dalam pemantauan dan pemeliharaan perangkat sehingga keberlangsungan program dapat tetap terjaga setelah kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat selesai dilaksanakan. Komitmen tersebut mencerminkan terbentuknya tata kelola keamanan lingkungan yang lebih partisipatif melalui kolaborasi antara masyarakat dan pengurus lingkungan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen bersama, kepercayaan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara para pemangku kepentingan.

Ringkasan hasil monitoring dan evaluasi program disajikan pada Tabel 3, yang menunjukkan perubahan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat

Aspek Evaluasi	Sebelum Program	Setelah Program
Sistem keamanan lingkungan	Mengandalkan ronda malam	Didukung sistem keamanan berbasis CCTV
Ketersediaan CCTV	Belum tersedia	Terpasang dan berfungsi dengan baik
Pemantauan lingkungan	Dilakukan secara manual	Dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan
Dokumentasi kejadian	visual Tidak tersedia	Tersedia melalui rekaman CCTV
Pengetahuan masyarakat	Terbatas	Meningkat melalui sosialisasi dan pelatihan
Partisipasi masyarakat	Belum terorganisasi secara optimal	Meningkat melalui pengelolaan sistem secara bersama

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa program tidak hanya berhasil menyediakan infrastruktur keamanan berupa sistem CCTV, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keamanan lingkungan secara mandiri. Integrasi antara penerapan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi antara pengurus RT dengan warga menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program (Hasan & Azis, 2018). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi teknologi akan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan apabila diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola partisipatif. Dengan demikian, tujuan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan keamanan lingkungan melalui implementasi sistem keamanan berbasis CCTV dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di RT 03/RW 09 Perumahan Plamongan Hijau, Kota Semarang berhasil mengimplementasikan sistem keamanan lingkungan berbasis Closed Circuit Television (CCTV) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antara tim pelaksana, pengurus RT, serta warga. Program tidak hanya menghasilkan tersedianya infrastruktur keamanan yang mendukung pemantauan lingkungan secara lebih efektif, tetapi juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam mengoperasikan serta mengelola sistem keamanan lingkungan secara mandiri. Keterlibatan masyarakat sejak tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program.

Implementasi sistem keamanan berbasis CCTV menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila diintegrasikan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola keamanan lingkungan yang partisipatif. Pendekatan tersebut memperkuat sinergi antara inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta sistem keamanan lingkungan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memiliki potensi untuk direplikasi pada kawasan

permukiman lain dengan karakteristik yang serupa. Keberlanjutan program memerlukan komitmen pengurus RT dan masyarakat dalam melakukan pemeliharaan perangkat, pengawasan operasional, serta evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sistem CCTV. Pengembangan program pada masa mendatang dapat diarahkan pada perluasan cakupan titik pemantauan, integrasi dengan sistem keamanan lingkungan lainnya, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan lanjutan agar efektivitas sistem keamanan berbasis teknologi dapat terus ditingkatkan.

REFERENSI

- Akbar, M. A., Adrian, F., Al-Huda, N., & Tarmizi, T. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir Untuk Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana Di Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi Ipteks (Jpki2)*, 2(6), 1851–1860.
- Alim, I., Taufik, A., & Nurdin, N. (2022). Collaborative Governance Through Public Service Malls In Barru Regency. *Journal Of Government And Political Issues*, 2(3), 167–174. <https://doi.org/10.53341/Jgpi.V2i3.89>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms As A Governance Strategy. *Journal Of Public Administration Research*
- Bryson, J. M., Edwards, L. H., & Van Slyke, D. M. (2018). Getting Strategic About Strategic Planning Research. *Public Management Review*, 20(3), 317–339. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1285111>
- Charisma, D., Hermanto, B., Purnomo, M., & Herawati, T. (2025). Building Business Resilience Through Strategic Entrepreneurship: Evidence From Culinary Micro-Enterprises In Bandung During The Covid-19 Pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 17(6), 1–25. <https://doi.org/10.3390/Su17062578>
- Cifuentes - Faura, J. (2024). Political Corruption And Earthquakes: Governance In Turkey Under Erdogan's Rule. *Governance*. <https://doi.org/10.1111/Gove.12869>
- Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2021). Strategic Agility, Business Model Innovation, And Firm Performance: An Empirical Investigation. *Ieee Transactions On Engineering Management*, 68(3), 767–784. <https://doi.org/10.1109/Tem.2019.2910381>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Evjen, T. Å., Hosseini Raviz, S. R., Petersen, S. A., & Krogstie, J. (2020). Smart Facility Management: Future Healthcare Organization Through Indoor Positioning Systems In The Light Of Enterprise Bim. *Smart Cities*, 3(3), 793–805. <https://doi.org/10.3390/Smartcities3030040>
- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local Government Innovation Model In Pekanbaru City, Indonesia: A Study Of Public Service Mall. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 302–314. <https://doi.org/10.26618/Ojip.V13i2.10137>
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaaan. *Al-Umron : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.36840/Alumron.V1i2.301>
- Hartono, H. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program “Sustainable Development Goals (Sdgs)” Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kabupaten Konawe). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 967–971. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V6i2.1634>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia Dalam Prseptif Lokal*. 3–15.

- Hasan, Rusli, M., L., Apriliani, Y., A., & Afdal. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Sejahtera Dan Mandiri (1 Ed.*
- Hatmanto, E. D., & Rahmawati, F. (2022). Pemberdayaan Sdm Desa Bangunjiwo Melalui Pelatihan Intensif Keterampilan Bahasa Inggris Sebagai Upaya Inisiasi Pendirian Kampung Inggris Muhammadiyah Bangunjiwo. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/Ppm.44.899>
- Herdianti, A., Hapsari, P. S., & Susanto, T. D. (2019). Modelling The Smart Governance Performance To Support Smart City Program In Indonesia. *Procedia Computer Science*, 161, 367–377. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.135>
- Héritier, A., & Eckert, S. (2008). New Modes Of Governance In The Shadow Of Hierarchy: Self-Regulation By Industry In Europe. *Journal Of Public Policy*, 28(1), 113–138. <https://doi.org/10.1017/S0143814x08000809>
- Irianto, H., Ananda Kurniawan, B., & Mulyono, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Mal Pelayanan Publik Mini Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 32–40. <https://doi.org/10.55499/Intelektual.V9i1.67>
- Kirk, R. (2023). Lifestyle Centers, The Next Boom And Bust After Shopping Malls? Governance, Public-Private Partnerships, And Guy Debord's Spectacle In Dallas-Fort Worth. *Cities*, 133, 104155. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104155>
- Moorcy, N. H., Yusuf, T., & Pudjiati, P. (2020). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Penajam. *Abdimas Universal*, 2(2), 66–69. <https://doi.org/10.36277/Abdimasuniversal.V2i2.62>
- Pantiwati, Y., Permana, F. H., Kusniarti, T., & Miharja, F. J. (2020). The Characteristics Of Literacy Management In School Literacy Movement (Slm) At Junior High School In Malang - Indonesia. *Asian Social Science*, 16(4), 15. <https://doi.org/10.5539/Ass.V16n4p15>
- Prasetyo, A., & Utami, T. (2019). Edukasi Kebersihan Lingkungan Melalui Kegiatan Gotong Royong Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 201–208.
- Purdy, J. M. (2012). A Framework For Assessing Power In Collaborative Governance Processes. *Public Administration Review*, 72(3), 409–417.
- Purwanti, I., Winarto, W. W. A., & Sucianti, N. (2021). Pemberdayaan Wirausahawan Muda Melalui Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha, Proposal Usaha Dan Analisis Laporan Keuangan Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 132–137. https://doi.org/10.32764/Abdimas_Ekon.V2i3.2099
- Rusydan, F. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Sitti Mukarramah, Indriani, & Zulaeha A. Amdadi. (2021). Development Of Strategic Methods For Family Balanced Counseling (Skb Kb) On The Selection Of Potential Acceptance Contraception Tools In Makassar. *International Journal Of Science, Technology & Management*, 2(4), 1340–1345. <https://doi.org/10.46729/Ijstm.V2i4.279>
- Steiss, A. W. (2019). *Strategic Management For Public And Nonprofit Organizations*. Routledge.
- Verma, P., Kumar, V., Mittal, A., Gupta, P., & Hsu, S. C. (2022). Addressing Strategic Human Resource Management Practices For Tqm: The Case Of An Indian Tire Manufacturing Company. *The Tqm*

- Journal*, 34(1), 29–69. <https://doi.org/10.1108/Tqm-02-2021-0037>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Zaenuri, M. (2021). New Model For Local Post Disaster Tourism Governance: Evidence From Indonesia's Merapi Volcano. *Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 25(2), 185. <https://doi.org/10.22146/jkap.63993>
- Zarychta, A., Grillos, T., & Andersson, K. P. (2020). Public Sector Governance Reform And The Motivation Of Street - Level Bureaucrats In Developing Countries. *Public Administration Review*, 80(1), 75–91. <https://doi.org/10.1111/puar.13132>